



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR / TAHUN 2021**

TENTANG

**AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL TAHUN 2021 DAN TINDAK LAJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Agar kinerja Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 bisa lebih terpantau dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pemimpin Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Para Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan monitoring, memberi dukungan, dan memfasilitasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam pelaksanaan aksi reformasi birokrasi Tahun 2021 pada 3 (tiga) Komponen Pengungkit yang meliputi Aspek Pemenuhan, Hasil antara Area Perubahan dan Aspek Reform, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

KEDUA : Para Ketua Kelompok Program beserta Anggota senantiasa berkoordinasi dengan Wakil Ketua dan Penanggung Jawab di tingkat unit kerja terkait dalam melaksanakan aksi sesuai bidang masing-masing.

KETIGA . . .

- KETIGA : Para Ketua Kelompok Program:
1. Memberikan laporan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua/Koordinator masing-masing program;
 2. Mendukung Asesor dalam menyusun lembar kerja evaluasi pelaksanaan aksi reformasi birokrasi kemudian diunggah ke Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua;
 3. Membuat laporan tahunan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tahun 2021 sesuai program masing – masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan disampaikan kepada Sekretaris pada akhir bulan November 2021; dan
 4. Membuat laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2020 sesuai program masing – masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan disampaikan kepada Sekretaris pada akhir bulan November 2021.
- KEEMPAT : Masa kerja Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 dan Tindak Lajut Hasil Evaluasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di J a k a r t a
Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



HARJO SUSMORO

LAMPIRAN I
 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 TAHUN 2021

**AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
Aspek Pemenuhan					
1.	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	Ketua Pok Program Manajemen Perubahan A	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
2.	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Diterbitkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 b. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

3. Tim . . .

1	2	3	4	5	6
3.	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
4.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan		Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024	B03
5.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi		Road Map telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024	B03
6.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi telah mencakup " <i>quick win</i> "		Road Map telah mencakup " <i>quick win</i> "	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi	B03, B06, B09, B12

Sekretariat . . .

1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024	
7.	Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit organisasi		Penyusunan <i>Road Map</i> telah melibatkan seluruh unit organisasi	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024	B03
8.	Telah terdapat sosialisasi/ internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi		Telah terdapat sosialisasi/ internalisasi <i>Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</i> unit kerja kepada anggota organisasi	Dilaksanakannya sosialisasi/ internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
9.	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik		PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Diterbitkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	B03
10.	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja		Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	Seluruh aktivitas PMPRB telah disosialisasikan	B03, B06, B09, B12
11.	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB		Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB	Dilaksanakan pelatihan untuk Tim Asessor PMPRB	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
12.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	B03, B06, B09, B12
13.	Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi		Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	Kertas kerja PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah direviu oleh Koordinator asesor	B03, B06, B09, B12
14.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi		Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	Telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
15.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Disosialisasikan dan dilaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	B03, B06, B09, B12
16.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan		Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	B03, B06, B09, B12

reformasi . . .

1	2	3	4	5	6
	reformasi birokrasi		reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
17.	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan		Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala	B03, B06, B09, B12
18.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/ unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
19.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus	Ketua Pok B Program Deregulasi Kebijakan	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan Setjen Wantannas	B03, B06, B09, B12
20.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	Disusunnya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

21. Adanya . . .

1	2	3	4	5	6
21.	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi		Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
22.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan		Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan Setjen Wantannas	B06, B12
23.	Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	Ketua Pok Program C Penataan dan	Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
24.	Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi	Penguatan Organisasi	Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi	a. Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

25. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
25.	Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.		Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
26.	Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan.		Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
27.	Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi		Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
28.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
29.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
30.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
31.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
32.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
33.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya		Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
34.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

berada . . .

1	2	3	4	5	6
	berada di bawahnya		bawahnya		
35.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
36.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
37.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
38.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
39.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
40.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

41. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
41.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Ketua Pok Program D Penataan Tata Laksana	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
42.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
43.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

c. Peraturan . . .

1	2	3	4	5	6
				c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
44.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
45.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
46.	Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

47. Prosedur . . .

1	2	3	4	5	6
47.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas c. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
48.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
49.	Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai		Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12

dengan . . .

1	2	3	4	5	6
	dengan tujuan pendirian organisasi			b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
50.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Arsitektur SPBE	Tersusunnya grand design sisfo kamnas	B12
51.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Peta Rencana SPBE	Tersusunnya grand design sisfo kamnas	B12
52.	Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya		Tim Koordinasi SPBE Kementerian/lembaga/pemerintah daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tim koordinasi SPBE b. Laporan monitoring dan evaluasi SPBE	B12
53.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang manajemen tatakelola SPBE	B03
54.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	a. Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang manajemen tatakelola SPBE b. Aplikasi layanan kepegawaian berbasis elektronik	B03
55.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik	a. Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang manajemen	B03

tata . . .

1	2	3	4	5	6
				tata kelola SPBE b. Aplikasi layanan kearsipan berbasis elektronik	
56.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	a. Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang manajemen tatakelola SPBE b. Aplikasi layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis elektronik	B03
57.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik		Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik	a. Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang manajemen tatakelola SPBE b. Aplikasi layanan publik berbasis elektronik	B03
58.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
59.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan Layanan Informasi Publik	B12

1	2	3	4	5	6
60.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	Ketua Pok Program E Penataan Sistem	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
61.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	Manajemen SDM Aparatur	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
62.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan		Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
63.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi		Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	a. Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

64. Pengumuman . . .

1	2	3	4	5	6
64.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat		Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media	B03, B06, B09, B12
65.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (<i>online</i>)		Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (<i>daring</i>)	Pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran	B03, B06, B09, B12
66.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif		Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat	B03, B06, B09, B12
67.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN		Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan	B03, B06, B09, B12
68.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka		Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	B03, B06, B09, B12
69.	Telah ada standar kompetensi jabatan		Telah ada standar kompetensi jabatan	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Kamus Kompetensi Teknis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	B03, B06, B09, B12
70.	Telah dilakukan <i>asesment</i> pegawai		Telah dilakukan <i>asesment</i> pegawai	Telah dilakukan <i>asesment</i> kepada seluruh pegawai	B12

71. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
71.	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi		Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	B03, B06, B09, B12
72.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Laporan peningkatan kompetensi SDM	B03, B06, B09, B12
73.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	B12
74.	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan		Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
75.	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan		Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
76.	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif		Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
77.	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen		Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif b. Keputusan . . .	B03

1	2	3	4	5	6
				b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang pembentukan panitia seleksi terbuka dan kompetitif pimpinan tinggi pratama d. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang pembentukan sekretariat panitia seleksi terbuka dan kompetitif pimpinan tinggi pratama	
78.	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka		Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan jabatan lowongan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal Dewan	B03

Ketahanan . . .

1	2	3	4	5	6
				Ketahanan Nasional	
79.	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja		Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	B12
80.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya	B12
81.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	B12
82.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan	B12
83.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
84.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
85.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku instansi	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Sesjen Wantannas Tentang Kode Etik	B12

instansi . . .

1	2	3	4	5	6
	instansi			Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
86.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)		Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
87.	Informasi faktor jabatan telah disusun		Informasi faktor jabatan telah disusun	Terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	B03
88.	Peta jabatan telah ditetapkan		Peta jabatan telah ditetapkan	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
89.	Kelas jabatan telah ditetapkan		Kelas jabatan telah ditetapkan	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
90.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
91.	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan		Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	B03
92.	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan		Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	B03
93.	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM		Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	B03
94.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	B03
95.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Ketua Pok Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan tim renstra	B03
96.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	B03
97.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	

98. Pimpinan . . .

1	2	3	4	5	6
98.	Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		Pimpinan/pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan tim renstra	B03
99.	Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		Pimpinan/pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun	B03
100.	Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala	B03
101.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	B03
102.	Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun		Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

tentang . . .

1	2	3	4	5	6
				tentang rencana startegis Dewan Ketahanan Nasional c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan indikator kinerja utama 2020 - 2024 d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
103.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	B03, B06, B09, B12
104.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ketua Pok Program G Penguatan Pengawasan	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

105. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
105.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>		Telah dilakukan public campaign	<i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala	B03, B06, B09, B12
106.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	B03, B06, B09, B12
107.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	B03, B06, B09, B12
108.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan tindak lanjut	B03, B06, B09, B12
109.	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP		Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
110.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	B03

di Lingkungan . . .

1	2	3	4	5	6
				di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
111.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi		Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja	Seluruh organisasi telah melakukan penilaian risiko	B03
112.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B03
113.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	B03, B06, B09, B12
114.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
115.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI	B12
116.	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat		Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

b. Keputusan . . .

1	2	3	4	5	6
				b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
117.	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Seluruh organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	B12
118.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	B12
119.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
120.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	B12
121.	Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>		Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran <i>whistle blowing system</i> di	B03

lingkungan . . .

1	2	3	4	5	6
				lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Tim <i>Whistle Blowing System</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
122.	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		Whistle Blowing System telah disosialisasikan	Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi	B03, B06, B09, B12
123.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan		Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Tim Whistleblowing System Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
124.	Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>		Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
125.	Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	B12
126.	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan		Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
127.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	B03, B06, B09, B12

128. Penanganan . . .

1	2	3	4	5	6
128.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
129.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
130.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
131.	Telah dilakukan penancangan zona integritas		Telah dilakukan penancangan zona integritas	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
132.	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas		Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	a. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI b. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di	B03

Lingkungan . . .

1	2	3	4	5	6
				Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
133.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas		Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Aksi ZI Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
134.	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan		Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI b. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas	B03
135.	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju		Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas	B03

WBK/WBBM” . . .

1	2	3	4	5	6
	WBK/WBBM”			dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
136.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan		Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	B12
137.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.		APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	B12
138.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai		APIP didukung dengan anggaran yang memadai	Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran	B12
139.	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko		APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	B12
140.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ketua Pok Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
141.	Standar pelayanan telah dimaklumkan		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website	B03

142. Dilakukan . . .

1	2	3	4	5	6
142.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat	B12
143.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	B03, B06, B09, B12
144.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	B03, B06, B09, B12
145.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

146. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
146.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (<i>Reward and Punishment</i>) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
147.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras	B03, B06, B09, B12
148.	Telah terdapat inovasi pelayanan		Terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain	B03, B06, B09, B12
149.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	B03, B06, B09, B12
150.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tim koordinasi pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) Setjen Wantannas	B03

151. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
151.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	B12
152.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Laporan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala	B12
153.	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun	B12
154.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	B12
155.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut IKM	B12
156.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	B03, B06, B09, B12
157.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sisfo Upgrade Pemeliharaan dan Update Sistem	B12

Hasil . . .

1	2	3	4	5	6	
Hasil Antara Area Perubahan						
1.	Hasil Pengawasan Kearsipan	Ketua Program Penataan	Pok D Tata	Kualitas Pengelolaan Arsip, diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI	Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 6/2019)	B12
2.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Laksana		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP	B12
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan			Kualitas Pengelolaan Keuangan, diukur dengan Indeks Pengelolaan Keuangandari kementerian keuangan	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	B12
4.	Indeks Pengelolaan Aset			Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	B12
5.	Indeks <i>Merit System</i>	Ketua Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pok E	<i>Merit System</i> , diukur dengan Indeks Sistem Merit dari KASN	Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9/2019)	B12
6.	Indeks Profesionalitas ASN			ASN Profesional, diukur dengan Indeks Profesionalitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN Nomor 8/2019)	B12

7. Indeks . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Indeks Perencanaan	Ketua Pok Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Aspek hasil antara diukur dengan Indeks Perencanaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.	Penilaian menggunakan Indeks Perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas	B12
8.	Maturitas SPIP	Ketua Pok Program G Penguatan Pengawasan	Penguatan pengawasan berjalan dengan baik di maturitas SPIP	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)	B12
9.	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)		Penguatan pengawasan berjalan dengan baik di Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)	B12
10.	Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	Ketua Pok Program H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	Penilaian merupakan hasil survei kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 dengan membagi tiga tingkatan kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	B12

Aspek . . .

1	2	3	4	5	6
Aspek Reform					
1.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	Ketua Pok Program A Manajemen Perubahan	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI d. Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
2.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12
3.	Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)		Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
				c. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI d. Tersusunnya laporan agent of change Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
4.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya	a. Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024 b. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Aksi ZI Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional e. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
				Dewan Ketahanan Nasional	
5.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi	Penghargaan – penghargaan yang diperoleh oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berhasil melaksanakan reformasi	B03, B06, B09, B12
6.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penunjukan <i>Role Model</i> Pengembangan Budaya Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
7.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Ketua Pok B Program Deregulasi Kebijakan	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
8.	Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi		Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan	B03

1	2	3	4	5	6
				Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
9.	Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi K/L/Pemda		Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Daftar Kebijakan (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga) Tahun 2020	B03, B06, B09, B12
10.	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	Ketua Pok Program C Penataan dan Penguatan Organisasi	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
11.	Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
				Dewan Ketahanan Nasional	
5.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi	Penghargaan – penghargaan yang diperoleh oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berhasil melaksanakan reformasi	B03, B06, B09, B12
6.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penunjukan <i>Role Model</i> Pengembangan Budaya Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
7.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Ketua Pok Program B Deregulasi Kebijakan	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
8.	Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi		Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan	B03

1	2	3	4	5	6
				Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
9.	Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi K/L/Pemda		Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Daftar Kebijakan (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga) Tahun 2020	B03, B06, B09, B12
10.	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	Ketua Pok Program C Penataan dan Penguatan Organisasi	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
11.	Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
12.	Hasil Evaluasi Kelembagaan		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kelembagaan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
13.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Ketua Pok Program D Penataan Tata Laksana	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
14.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
15.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
16.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Penggunaan berbagai aplikasi digital di tiap - tiap unit kerja telah mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan nilai manfaat sehingga memberikan dampak positif untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
17.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Aplikasi internal khususnya dibidang administrasi pemerintahan telah mampu membantu dan mendorong tata kelola organisasi menjadi lebih mudah dan cepat serta menjaga prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Aplikasi internal tersebut adalah aplikasi SANRICE, Aplikasi SIMDOKJI (Sistem Informasi Dokumen Kajian), SIDIK, SRIKANDI, E-KINERJA ASN, Kesekretariatan Online	B03, B06, B09, B12
18.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Portal Setjen Wantannas secara berkala telah mempublikasikan kepada publik tentang program kerja, kegiatan, dan capaian yang perlu diketahui oleh publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, simpul informasi Setjen Wantannas lainnya khususnya di media sosial (Instagram, youtube, facebook, website) cukup responsif dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada publik	B03, B06, B09, B12
19.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya	Ketua Program Penataan Pok E	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
20.	Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan	Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan	Rencana terkait penggunaan aplikasi e-kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	B03, B06, B09, B12
21.	Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang		Diukur dengan melihat apakah hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang	Evaluasi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan pada jabatan pimpinan tinggi pratama ke atas yg sudah menjabat diatas 5 th di posisi yg sama Persentase diperoleh dari Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas sudah menjabat lebih dari 5 th yang sudah dirotasi dibagi dengan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas yang sudah menjabat lebih dari 5 th	B03, B06, B09, B12
22.	Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		Diukur dengan melihat apakah hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	B03, B06, B09, B12
23.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
24.	Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru	Persentase diperoleh dari Jumlah formasi yang diusulkan dibagi dengan Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai	B03, B06, B09, B12
25.	Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan Birokrasi		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi telah dilakukan	Presentase Jabatan Administrasi yang dilakukan penyetaraan jabatan ke Jabatan Fungsional	B03, B06, B09, B12
26.	Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritisal dan rencana suksesi jabatan		Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritisal dan rencana suksesi jabatan	Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar penempatan pada seluruh jabatan kritisal dan rencana suksesi jabatan	B03, B06, B09, B12
27.	Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi		Dilakukan Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Presentase pejabat Pimpinan Tinggi yang ditetapkan melalui proses manajemen talenta	B03, B06, B09, B12
28.	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Ketua Pok Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2020	B03, B06, B09, B12

Persentase . . .

1	2	3	4	5	6
			Persentase Anggaran yang berhasil di- <i>refocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2020	B03, B06, B09, B12
29.	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran	B03, B06, B09, B12
30.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment	B03, B06, B09, B12
31.	Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	B03, B06, B09, B12
32.	Persentase penyampaian LHKPN	Ketua Pok Program G Penguatan Pengawasan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang harus melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang sudah melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B03, B06, B09, B12

33. Persentase . . .

1	2	3	4	5	6
33.	Persentase penyampaian LHKASN		Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang harus melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang sudah melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B03, B06, B09, B12
34.	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpinan unit kerja eselon I/kepala OPD dan Menteri/Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali	B03, B06, B09, B12
35.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat	Realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	B03, B06, B09, B12
36.	Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif)		Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif)	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12
			Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12
			Jumlah WBK dalam 1 tahun	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12

Jumlah . . .

1	2	3	4	5	6
			Jumlah WBBM dalam 1 tahun	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12
37.	APIP telah menjalankan fungsi konsultatif		APIP telah menjalankan fungsi konsultatif	APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja	B03, B06, B09, B12
38.	APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja		APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja	APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll	B03, B06, B09, B12
39.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web, Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan	Ketua Pok Program H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web, Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Presentase upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik	B03, B06, B09, B12

Pengaduan . . .

1	2	3	4	5	6
	Pengaduan, Saran dan Masukan				
40.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi		Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi	Presentase upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah	B03, B06, B09, B12
41.	Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab	Jumlah penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	B03, B06, B09, B12

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
HARJO SUSMORO



LAMPIRAN II
 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 TAHUN 2021

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2020**

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pusat dan Unit Kerja	Ketua Pok Program A Manajemen Perubahan	Program - program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas serta rencana kerja pada level unit kerja agar fokus pada upaya - upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
2.	Memaksimalkan peran agen perubahan		Memaksimalkan peran agen perubahan agar dirasakan nyata dampaknya, khususnya pada tingkat unit kerja sehingga memberikan	a. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi	B06, B12

kontribusi . . .

1	2	3	4	5	6
			kontribusi menjadikan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional semakin kuata dan memenuhi harapan <i>stakeholder</i>	Pelaksanaan Aksi Agen Perubahan	
3.	Menyusun SOP terkait dengan sistem pengendalian penyusunan peraturan dan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Ketua Pok Program B Deregulasi Kebijakan	Menyusun SOP terkait dengan sistem pengendalian penyusunan peraturan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya serta kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada <i>stakeholder</i>	a. Menyusun SOP terkait dengan sistem pengendalian penyusunan peraturan b. Menyusun memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan	B03, B06, B09, B12
4.	Meningkatkan kualitas JDIH		Meningkatkan kualitas JDIH agar lebih informatif, diantaranya memuat berita hukum, berita proses penyusunan peraturan	Meningkatkan kualitas website JDIH	B12
5.	Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala	Ketua Pok Program D Penataan Tata	Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja dapat berjalan secara optimal	Laporan monitoring dan evaluasi peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
6.	Optimalisasi penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE	Laksana	Melakukan optimalisasi penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan menyusun perencanaan pengembangan SPBE	Mengintegrasikan penerapan <i>e-government</i> dengan perencanaan pengembangan SPBE	B12

7. Mengoptimalkan . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti hasil <i>assessment</i>	Ketua Pok Program E Penataan Sistem Manajemen	Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil <i>assessment</i> sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi	Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM	B12
8.	Menyelesaikan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan	SDM Aparatur	Menyelesaikan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan	Menyusun dan mengesahkan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan	B12
9.	Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)		Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)	Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)	B12
10.	Menerapkan manajemen talenta		Menerapkan manajemen talenta	Laporan pelaksanaan manajemen talenta Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
11.	Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu	Ketua Pok Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	B12
12.	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal	Ketua Pok Program G Penguatan Pengawasan	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama pada penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP	B06 dan B12

13. Meningkatkan . . .

1	2	3	4	5	6
13.	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis		Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

